

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses historis, yang bergerak dari waktu ke waktu dan tidak pernah berhenti (Sumodininingrat dan Nugraha, 2005:1). Pembangunan tidak bisa berhenti atau diberhentikan, sebab kehidupan manusia selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Hakikat dari pembangunan harus mencakup perubahan sikap, mental dan perilaku dari masyarakat sehingga yang terjadi tidak hanya perubahan fisik atau material saja (Adon Nasurullah Jamaludin, 2016: 5).

Secara sederhana, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan dengan upaya yang terus menerus demi meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat atau negara yang berkehendak melaksanakan pembangunan tersebut. Pembangunan juga dapat merubah kehidupan yang belum baik atau memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Theresia, dkk., 2015: 2).

Usaha perubahan dalam pembangunan ini dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, karena pada intinya kebijakan pemerintah merupakan hasil dari perpaduan keinginan dan pendapat masyarakat (Judiono: 2009, 581). Pembangunan masyarakat dirumuskan sebagai suatu proses melalui usaha dan prakarsa dari masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju mewujudkan kondisi dan hubungan yang semakin serasi antara kebutuhan dan sumberdaya melalui pambangunan kapasitas masyarakat untuk melakukan proses pembangunan (Harun dan Elvinaro, 2012: 13-14).

Paradigma pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada paradigma pertumbuhan dengan karakteristik memperluas pengembangan teknologi dan membangun infrastruktur. Namun, pada kenyataannya paradigma ini gagal mewujudkan *trickle down effect*-nya yaitu suatu dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah sehingga kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah semakin nyata, ketidakadilan dalam akses ekonomi maupun politik (Jamaludin, 2016: 20).

Kegagalan paradigma pembangunan ini mengilhami munculnya paradigma baru, yaitu paradigma kesejahteraan (Jamaludin, 2016: 20). Paradigma kesejahteraan ini pun mengalami kendala karena pada pelaksanaan pembangunannya, masyarakat diposisikan sebagai objek dari pembangunan sehingga hal ini menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada pemerintah dalam hal melindungi, menyelamatkan dan menyejahterakan hidup mereka.

Kelemahan paradigma pembangunan dan kesejahteraan ini memunculkan paradigma baru yaitu *people center development*, yaitu memperhatikan keseimbangan ekologi yang didukung oleh sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan dengan paradigma ini yaitu

pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* (Jamaludin, 2016: 22).

Instrumen pembangunan yang dibutuhkan masyarakat adalah tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat serta kualitas hidup yang lebih baik. Maka dengan demikian, setiap pembangunan yang dilakukan harus berdasarkan asas kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kebutuhan mendasar (*basic needs*) masyarakat yang harus terpenuhi karena hal tersebut dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan pendidikan. Tentu saja setiap pembangunan infrastruktur harus memiliki manfaat jangka panjang dan asas keberlanjutan.

Pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk menjadikan setiap pembangunan tidak hanya memberi dampak yang sesaat saja, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam ketertiban dunia.

Asas tujuan pembangunan berkelanjutan ini pada umumnya merupakan suatu hal yang harus diterapkan dalam pembangunan apapun baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini disebabkan oleh tujuan jangka panjang yang

diutamakan namun tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Dalam pembangunan fisik atau infrastruktur maka harus memperhatikan berbagai elemen yang menjadi pendorong serta penghambat tentu juga dengan sebab akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pun perlu untuk memperhatikan kelangsungan lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan secara umum dan pembangunan infrastruktur secara khusus maka potensi sumber daya yang dimiliki harus dikembangkan dan dimanfaatkan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan karena ia sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Maka pengembangan potensi, peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat penting dan harus ditingkatkan. Suatu pembangunan akan dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dan merupakan suatu modal utama dalam mencapai dan mewujudkan suatu pembangunan (Ripai, 2013: 13). Suatu keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya berdasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah tetapi juga upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka pembangunan tersebut akan kurang efektif.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini dapat diartikan berpartisipasi dalam penentuan arah, strategi serta kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan dan

memperoleh hasil serta manfaat dari pembangunan tersebut secara berkeadilan (Judiono, 2009: 582).

Pembangunan partisipatif harus dimulai oleh masyarakat yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya (Wahyuddin, 2018: 4). Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan, maka pemerintah seharusnya memposisikan diri sebagai fasilitator yang menunjang kegiatan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang partisipatif merupakan suatu strategi pembangunan dan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kelurahan Cipadung pada umumnya telah berlangsung dengan baik dan memperhatikan posisi serta peran yang sesuai antara masyarakat dan pemerintah dalam prosesnya. Selain itu juga, setiap pembangunan yang dilaksanakan merupakan hasil dari musyawarah dengan masyarakat yang dimulai dari rembug tiap RT dan RW di Kelurahan Cipadung.

Begitu juga pembangunan yang dilakukan di RW 01 Kelurahan Cipadung, khususnya pembangunan infrastruktur. Setiap pembangunan yang dilaksanakan selalu mengalami kemajuan dalam berbagai sektor dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pun seimbang dengan upaya pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Namun, suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dicapai melalui pembangunan dan sikap partisipatif masyarakat terhadap pembangunan. Apabila dua hal tersebut telah terpenuhi maka pembangunan pun akan terlaksana dengan lancar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat.

Kesadaran untuk ikut serta dan terlibat atau berpartisipasi di masyarakat RW 01 pada umumnya dapat dikatakan dalam kategori partisipasi aktif. Namun, sikap dan karakteristik partisipatif ini hanya dimiliki oleh sebagian orang saja di dalam masyarakat. Partisipasi yang dilakukan pun harus melalui instruksi atau pergerakan awal terlebih dahulu dan bukan berdasarkan kesadaran secara langsung. Sehingga, masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau pembangunan infrastruktur masih bersifat situasional saja bukan sebagai kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat.

Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan umumnya dan pembangunan infrastruktur khususnya harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan masyarakat dapat merasakan dampak yang bermanfaat dari pembangunan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Deskriptif Masyarakat RW 01 Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan observasi di lapangan, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya proses pembangunan infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat RW 01 Kelurahan Cipadung.
2. Adanya keterlibatan serta pengaruh yang kuat dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan kepada partisipasi masyarakat dalam pembangunan di RW 01 Kelurahan Cipadung.
3. Adanya berbagai bentuk partisipasi yang tumbuh di masyarakat RW 01.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur di RW 01 Kelurahan Cipadung?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di RW 01 Kelurahan Cipadung?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di RW 01 Kelurahan Cipadung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka fokus kajian penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dalam pembangunan infrastruktur di RW 01 Kelurahan Cipadung.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di RW 01 Kelurahan Cipadung.
3. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di RW 01 Kelurahan Cipadung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka hal yang diharapkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran maupun perspektif pandangan baru dalam keilmuan sosiologi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan bagi masyarakat agar dapat menyadari serta mampu meningkatkan keterlibatan perannya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia yang meliputi perbaikan tingkat hidup, pendidikan, kesehatan serta keadilan. Secara sederhana, pembangunan merupakan usaha menuju yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai gagasan atau ide untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Bentuk dari gagasan tersebut adalah suatu upaya untuk megarahkan pembinaan, pengembangan dan pembangunan bangsa (Jamaludin, 2016: 6).

Pembangunan dalam sosiologi adalah suatu cara menggerakkan masyarakat dalam untuk mendukung pembangunan, serta masyarakat diposisikan sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan itu sendiri. Secara sosiologis, yang menjadi fokus utama dalam prioritas pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat elit saja tetapi juga masyarakat lapisan bawah. Pada hakikatnya, tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga suatu proses dan usaha pembangunan memiliki arti humanisasi yaitu memanusiakan manusia (Jamaludin, 2016: 2-3).

Prioritas pembangunan apabila dilihat dari perspektif sosiologi adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi secara keseluruhan yang dirasakan oleh berbagai lapisan dalam masyarakat dan sebagai upaya memberantas kemiskinan. Pembangunan dilaksanakan atas dasar keinginan dan aspirasi masyarakat yang

menginginkan meningkatnya taraf kualitas hidup mereka dengan dibarengi oleh visi, misi dan juga tujuan dari pemimpin yang memiliki prospek jangka panjang dalam mewujudkan suatu pembangunan.

Pada umumnya, suatu pembangunan melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini seluruh aspirasi dari masyarakat dan perencanaan dari pemerintah dituangkan dalam perencanaan sebelum suatu pembangunan dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini dilakukan apabila perencanaan suatu pembangunan telah selesai dirumuskan. Dalam tahap pelaksanaan juga harus memperhatikan faktor penunjang dan penghambat suatu pembangunan tersebut.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dari pembangunan tersebut, selain itu tahap evaluasi juga dapat dijadikan analisa mengenai perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan tersebut.

Suatu pembangunan harus memiliki dampak dalam jangka panjang dan memperhatikan berbagai aspek. Berbagai paradigma dalam pembangunan berusaha mewujudkan hal tersebut namun tetap mengalami berbagai kendala

sehingga paradigma pembangunan berkelanjutan yang dianggap mampu untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan yang humanis.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini memberi wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam dan masa yang akan datang sehingga pembangunan saat ini tidak merugikan di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga inti utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Jamaludin, 2016: 117).

Menurut Keraf dalam Rahayu (2012: 6) Kebijakan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kebijakan yang cukup kompleks, karena berusaha menggabungkan sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan suatu etika politik dan komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan diorganisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur pun pada hakikatnya harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa mengenyampingkan keseimbangan alam. Dengan kata lain seluruh kegiatan pembangunan di masyarakat pada saat ini haruslah menjunjung asas dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan baik pembangunan di bidang fisik seperti infrastruktur, sarana prasarana maupun yang bersifat non fisik yaitu pembangunan sumber daya manusia.

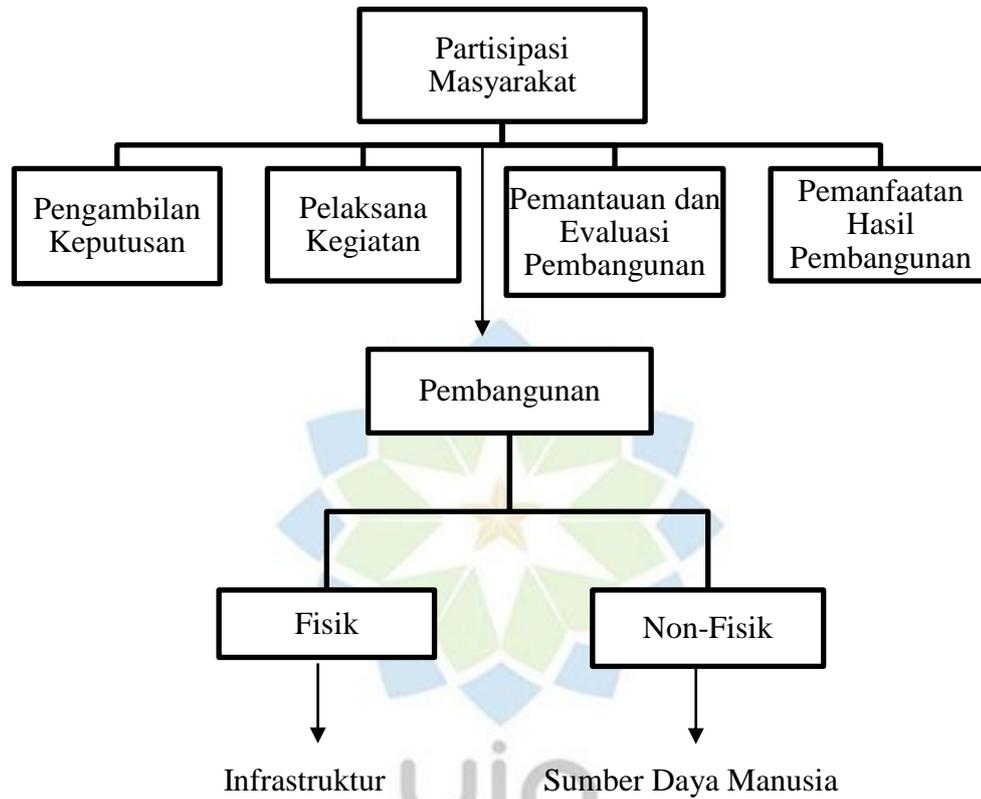
Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator produktivitas, efisiensi dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut harus meningkatkan produktivitas dari masyarakat dan kualitas sumber daya manusia,

peningkatan produktivitas harus ditunjang oleh efisiensi dari hasil pembangunan tersebut dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting karena dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki visi pembangunan humanis. Manusia atau masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan tersebut namun juga sekaligus sebagai subjek yang melaksanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari indikator keberhasilan suatu pembangunan.

Partisipasi masyarakat sebagai kesatuan sistem maupun individu merupakan suatu sistem integral dalam yang sangat penting dalam dinamika proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan dari pembangunan tidak hanya dari pihak pemerintah saja tetapi juga dari kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menentukan pencapaian target dan tujuan dari suatu pembangunan menuju yang lebih baik.

Kerangka Berpikir:



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir